

BUDAYA HUKUM MENGENAI PENGUASAAN TANAH
NEGARA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN EKONOMI
MASYARAKAT LOKAL KABUPATEN SUMBAWA,
NUSA TENGGARA BARAT



TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum

Oleh :

ARIEF RAHMAN,SH.
NIM : B4A. 001.008

DOSEN PEMBIMBING :
PROF. RONNY HANITIJO SOEMITRO, SH

PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
2003

BUDAYA HUKUM MENGENAI PENGUSAAN TANAH
NEGARA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN EKONOMI
MASYARAKAT LOKAL KABUPATEN SUMBAWA,
NUSA TENGGARA BARAT



TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum

Oleh :

ARIEF RAHMAN,SH.
NIM : B4A. 001.008

DOSEN PEMBIMBING :
PROF. RONNY HANITIJO SOEMITRO, SH

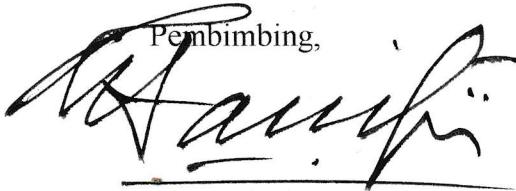
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
2003

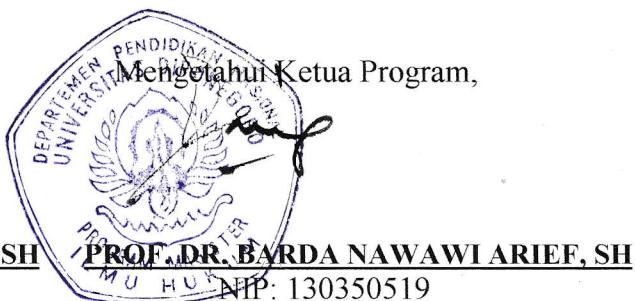
**BUDAYA HUKUM MENGENAI PENGUASAAN TANAH
NEGARA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN EKONOMI
MASYARAKAT LOKAL KABUPATEN SUMBAWA,
NUSA TENGGARA BARAT**

**Disusun Oleh:
ARIEF RAHMAN, SH
NIM: B4A 001008**

Dipertahankan dihadapan Dewan Pengaji
Pada Tanggal 9 Oktober 2003

Tesis ini telah diterima
Sebagai Persyaratan untuk memperoleh Gelar
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing,

PROF. RONNY HANITIJO SOEMITRO, SH
NIP. 130350517



MOTTO:

- Tiada kata jera dalam perjuangan, sekali gagal bukan berarti gagal untuk seterusnya. Belajarlah dari kegagalan dalam meniti prestasi menuju kemenangan.
- Hidup adalah pola pikir. Baik buruknya kehidupan sangat ditentukan oleh pola pikir itu. Dan sebaik-baik pola pikir adalah yang bersumber dari Al Qur'an dan Al Hadist.

PERSEMBAHAN

- Sembah sujud buat kedua orang tuaku : Ayahanda H.Buraeng (Alm) dan ibunda Bidasari Ibrahim.
- Tesis ini kupersembahkan kepada:
 1. Isteriku tercinta : Khadijah Resyadinova
 2. Anak-anakku tersayang : Diman Ade Mulada dan Dadi Arja Kusuma
 3. Adik-adikku dan saudara-saudaraku:
 - Dra. Mastari dan Suharto, SH
 - M. Amirin dan Sri Rohayu
 - Joni Ikhsan dan Yanti Hartati
 - Sri Hartati dan Adi Manurung
 - Pawanari, S.Ag

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas perkenanNya Jualah, penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sesuai dengan rencana. Pembuatan sebuah Tesis merupakan suatu persyaratan akademik yang diwajibkan bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan study pada Program Magister, tidak terkecuali Program Magister Ilmu Hukum.

Masalah-masalah aktual yang diangkat dan dianalisis dalam tesis ini adalah dirancang sesuai dengan bakat dan minat penulis, tetapi tetap pada koridor konsentrasi bidang kajian yang penulis geluti.

Tesis ini penulis titik beratkan pada soal agraria khususnya yang menyangkut aspek penguasaan tanah. Tanah adalah benda tetap yang sangat penting artinya bagi manusia dan mahluk-mahluk lainnya di permukaan bumi. Karena itu tanah merupakan salah satu sumber produksi selain modal dan tenaga kerja.

Meskipun Hukum Pertanahan Nasional sudah resmi berlaku 42 tahun yang silam, nampaknya kehadiran Undang-undang itu belum mampu meredam keinginan dan upaya masyarakat pedesaan umumnya dan khususnya masyarakat pedesaan/llokal Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat untuk membuka dan menguasai tanah berdasarkan budaya hukum mereka. Fakta inilah yang mengilhami penulis untuk merumuskan judul “Budaya Hukum Mengenai Penguasaan Tanah Negara Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Masyarakat Lokal Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat”.

Dalam penulisan tesis ini tidak sedikit dijumpai kendala atau hambatan, namun semua itu dapat diatasi atas bantuan berbagai pihak. Untuk itulah maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Ronny Hanitijo Soemitro, SH, sebagai pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran dan petunjuk serangkaian dengan penulisan tesis ini sehingga tesis ini penulis dapat rampungkan.

Selain itu penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang
2. Ibu Ani Purwanti, SH. M.Hum, Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang
3. Bapak Gubernur NTB yang telah memberikan ijin penelitian melalui Ketua Bapeda untuk melakukan penelitian di wilayahnya
4. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Staf Akademik Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang
6. Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoron Semarang berserta staf
7. Bapak kepala BPN Kabupaten Sumbawa, NTB berserta staf
8. Rekan-rekan senasib seperjuangan serta semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil demi kelangsungan proses studi hingga selesai

Semoga kebaikannya dicatat oleh Allah SWT sebagai amal ibada. Amin.

Disamping itu, penulis menyadari bahwa apa yang disajikan lewat tesis ini masih banyak kekurangannya, untuk itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan tesis ini penulis terima dengan lapang dada.

Penulis

ABSTRAK

Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 disahkan dan dinyatakan berlaku pada tanggal 24 september 1960. Sejak saat itu Bangsa Indonesia sudah mempunyai Hukum Pertanahan yang bersifat nasional sebagai pengganti Hukum Agraria Kolonial yang berlaku sebelumnya. Kendati Hukum Pertanahan nasional sudah ada dan berlaku lebih dari 42 tahun lamanya, dalam realitas, tidak dapat dipungkiri bahwa penguasaan tanah di kalangan masyarakat pada berbagai daerah, tidak terkecuali masyarakat lokal Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, kerap dilakukan berdasarkan nilai-nilai/kaidah-kaidah sosial yang hidup dan mentradisi. Meskipun nilai-nilai/kaidah-kaidah sosial itu tidak tertulis tetapi senantiasa dipedomani dan dipatuhi anggota masyarakat setempat dalam bertingkah laku. Nilai-nilai/kaidah sosial dimaksud dalam pandangan Antropologi Hukum dikenal dengan Hukum Rakyat (Non Statute Law). Jika nilai/kaidah sosial itu dikaitkan dengan sistem hukum menurut Friedman, maka nilai/kaidah sosial tersebut termasuk dalam katagori unsur budaya hukum. Hal inilah yang menjadi objek kajian penulis dalam tesis ini di bawah rumusan judul: "Budaya Hukum Mengenai Penguasaan Tanah Negara Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Masyarakat Lokal Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat".

Dengan judul di atas, penulis ingin memahami bagaimana wujud budaya hukum penguasaan tanah oleh masyarakat lokal/pedesaan Sumbawa, pengakuan UUPA terhadap tanah yang dikuasai atas dasar budaya hukum serta bagaimana relevansinya dengan pengembangan ekonomi masyarakat pemegang hak atas tanah tersebut.

Penulisan tesis ini bersifat deskriptif analitis atas dasar hasil penelitian dengan metode pendekatan normative dan empiris. Jenis dan sumber data adalah primer dan sekunder. Data primer diperoleh di lapangan lewat penelitian dan data sekunder sebagai data pendukungnya. Data kemudian dianalisis secara kualitatif dengan langkah yang bersifat umum yakni, reduksi data, display data serta mengambil kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, wujud budaya hukum penguasaan tanah oleh masyarakat lokal (pedesaan) Sumbawa, NTB, dapat dilihat dari dua aspek yaitu, dari dasar penguasaan dan persepsi masyarakat terhadap tanah yang dikuasai berdasarkan budaya hukum. Tanah yang dikuasai atas dasar budaya hukum itu, mendapat pengakuan dari UUPA, hal itu terlihat dengan dimungkinkannya pemegang hak atas tanah untuk mendapatkan sertifikat hak milik, sebagai satu-satunya alat bukti hak yang kuat dalam pandangan UUPA. Penguasaan tanah itu tidak serta merta dapat menunjang pengembangan ekonomi masyarakat lokal (pedesaan) yang menguasai tanah, hal itu sangat tergantung pada kondisi tanah/lahan yang mereka kuasai serta ketersediaan sumber mata air yang bisa diandalkan untuk pengairan.

ABSTRACT

The Agrarian Main Act Number 5, 1960 was legalized and asserted to be valid on September 24, 1960. Since then, Indonesian people had owned a national land Law which replaced the previously applied Colonial Agrarian Law. Although the national Land Law has been applied for 42 years, the reality shows that land ownership and domination system in various areas, including the local society in Sumbawa, West Nusa Tenggara Province, is performed on the basis of social values and norms that still exist in society. Although the social values and norm are the unwritten norms but they are always consistently used and obeyed by the lokal community members in all activities. The social values and norms, in the perspective of Anthropology of Law, are known as Non-Statute Law. When the social values and norms are referred on legal system according to Friedman, they can be categorized as legal culture. This is the main object of the analysis in this thesis entitled :: "Legal Culture about the Domination of State Land for the Development of Economy of the Local Community in Sumbawa, West Nusa Tenggara".

Through the title above, the writer tries to understand the type of legal culture of land domination by the rural community in Sumbawa, the confession of the Agrarian Main Act towards the system of land domination on the basis of legal culture and its relevance to the development of the economy of the people who dominate the land.

This thesis is descriptive in nature in which the results of the analysis are obtained through the application of normative and empirical approaches. The type and source of data are primary and secondary. The primary data was collected in the field through research while the secondary data was made the supporting data. Then the data was analyzed qualitatively following the general steps such as reduction of data, display of data, summarizing and verification.

The research results indicates that legal culture of land ownership in Sumbawa, West Nusa Tenggara, can be viewed in two aspects, those are, the basis of the land domination and the community's perception towards the land that they dominate based on the legal culture. The Agrarian Main Act confesses the land domination through legal culture which is indicated by the ownership of land certificate for the community members who dominate the land, and the certificate is the only evidence of land ownership considered valid and legal under the Regulation (Law). Howefer, it is found that the domination of land does not contribute to the development of the economy of the rural community, it depends on the condition of the controlled land and the provision of water for irrigation.

DAFTAR ISI

Halaman.

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMPAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK/ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
a. Latar Belakang Masalah.....	1
b. Perumusan Masalah.....	4
c. Tujuan Penelitian.....	6
d. Kontribusi Penelitian.....	7
e. Kerangka Teoritik	7
f. Metodologi Penelitian.....	23
1. Metode Pendekatan.....	23
2. Spesifikasi Penelitian.....	25
3. Lokasi Penelitian.....	25
4. Jenis dan Sumber Data.....	26
5. Tehnik Pengumpulan data.....	26
6. Tehnik Pengecekan validitas data.....	28
7. Tehnik Analisa Data.....	29
g. Sistematika Penulisan.....	30
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	32
A. Konsepsi Tentang Budaya Hukum.....	32
1. Pengertian Budaya Hukum.....	32
2. Hukum Adat Sebagai Pola Budaya.....	34
3. Keterkaitan Antara Budaya Hukum Dengan Penegakan Hukum.....	42
B. Penguasaan Tanah Menurut perspektif Hukum Agraria kolonial, Hukum Adat dan Hukum Agrarianasional	
1. Penguasaan Tanah menurut Perspektif Hukum AgrariaKolonial.....	48
1.1. Dasar Pengaturan Hukum Agraria Kolonial.....	48
2.2. Penguasaan Tanah Oleh Negara dan Pemberian Hak kepada Perorangan.....	56
2. Penguasaan Tanah Menurut Perspektif Hukum Adat.....	64
2.1. Hak Ulayat sebagai hak yang tertinggi dalam hal PenguasaanTanah.....	64
2.1. Hak Perorangan Atas Tanah.....	66
2.2. Hubungan Hak Ulayat dengan Hak Perorangan.....	68

3. Penguasaan Tanah Menurut Perspektif Hukum Agraria Nasional.....	69
3.1. Lahirnya Hukum Agraria Nasional.....	69
3.2. Hukum Adat sebagai Dasar Hukum Agraria Nasional.....	73
3.3. Hak Menguasai Oleh Negara.....	88
3.4. Hak Perorangan Atas Tanah.....	91
3.5. Kepastian Hukum bagi Pemegang Hak Atas Tanah.....	95
C. Pola Penggunaan Tanah Dan Kegiatan Ekonomi.....	101
1. Pola Penggunaan Tanah.....	101
1.1. Penggunaan Tanah di Wilayah Pedesaan.....	101
1.2. Penggunaan Tanah di Wilayah Perkotaan.....	103
2. Kegiatan Ekonomi.....	106
2.1. Pengertian Ekonomi Tanah.....	106
2.2. Perkembangan Ekonomi Tanah.....	108
2.3. Aspek Ekonomi Tanah.....	108
2.4. Kegiatan Ekonomi.....	111
2.5. Penggunaan Tanah Bagi Kegiatan Ekonomi di Wilayah Pedesaan.Pedesaan.....	113
2.6. Penggunaan Tanah Bagi Kegiatan Ekonomi di Wilayah Perkotaan.....	115
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	117
A. Gambaran Umum Kabupaten Sumbawa.....	117
B. Wujud Budaya Hukum Penguasaan Tanah Negara Oleh Masyarakat Lokal Kabupaten Sumbawa.....	124
B.1. Dasar-Dasar Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat Lokal Kabupaten Sumbawa.....	124
B.2. Persepsi Masyarakat Lokal Kabupaten Sumbawa Terhadap Tanah yang dikuasai.....	135
C. Pengakuan UUPA Terhadap Eksistensi Hak Masyarakat Lokal Kabupaten Sumbawa terhadap Tanah yang dikuasai atas dasar Budaya Hukum.....	151
D. Relevansi Penguasaan Tanah Negara dengan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Lokal Kabupaten Sumbawa.....	180
BAB IV. PENUTUP.....	198
A. Kesimpulan.....	198
B. Saran	200

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Banyaknya Sertifikat yang diterbitkan oleh BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa,Tahun 2003.....	123
Tabel 2. Dasar Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat lokal/pedesaaan Sumbawa.....	130
Tabel 3. Pengakuan Responden yang sudah memiliki “pas” atas tanah yang dikuasai.....	138
Tabel 4. Jenis Transaksi tanah yang lazim berlaku	141
Tabel 5. Pemanfaatan tanah/lahan oleh anggota masyarakat lokal/pedesaan Sumbawa. dalam 15 Tahun terakhir.....	188
Tabel 6. Kuantitas Makan Responden.....	191